

PERMASALAHAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM PERCEPATAN TEKNOLOGI LINGKUNGAN DI KONGO

Arhama Nurikhtiar

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional,
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
anurikhtiar@gmail.com

Anmita Intan Fatimah

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional,
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
Anmitaintanf@gmail.com

Nurul Annisa

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional,
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
Nurulannisa067@gmail.com

Abstrak

Percepatan Teknologi yang saat ini dilakukan oleh negara dunia pertama mengalami banyak permasalahan bagi negara dunia ketiga termasuk di Kongo yang harus mengikuti aturan internasional secara tidak langsung. Kongo sebagai pemilik sumber daya alam yang besar dalam kebutuhan percepatan teknologi transisi dari minyak bumi ke baterai mengalami eksploitasi dan munculnya pekerja paksa karena kebutuhan dunia yang saat ini sangat penting dalam mengatasi emisi minyak bumi. Pencarian data dalam analisis tulisan ini menggunakan teknik studi pustaka dengan memanfaatkan data-data sekunder dan penelitian terdahulu. Data berasal dari ungkapan tokoh-tokoh yang menyaksikan langsung dinamika kehidupan masyarakat sebagai pekerja di Kongo. Teori Resource Curse, dimana pemerintah tidak mampu mengelola sumber daya alam serta kehidupan pekerja dengan baik. Justru pemerintah Kongo memiliki permasalahan sendiri di dalam tubuh internalnya sehingga masyarakat pekerja yang memiliki status jauh di bawah, tidak diperhatikan dengan baik kesejahteraannya. Pelanggaran hak-hak pekerja tambang terutama pekerja anak-anak akibat adanya eksploitasi sumber daya alam yang ada di wilayah Kongo karena kepentingan dunia akan kebutuhan "Green Technology". Keterlibatan beberapa perusahaan global dalam

memanfaatkan kekayaan mineral di Kongo. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dunia keilmuan serta dapat bermanfaat kepada peneliti untuk melakukan kajian penelitian selanjutnya dan bagi para pembaca untuk menjadi pembelajaran serta menambah wawasan.

Kata-kata kunci: Eksploitasi, Pekerja Paksa, Kongo, *Green Techonology*

Abstract

The Acceleration of Technology which is currently carried out by first world countries experiences many problems for third world countries including Congo which must indirectly follow international rules. Congo as the owner of large natural resources accelerating the technology transition from petroleum to batteries is experiencing exploitation and the emergence of forced labor due to the world's current needs are very important overcoming petroleum emissions. The search for data in the analysis of this paper uses literature study techniques by utilizing secondary data and previous research. Data from expressions of figures who witnessed people's lives as workers in the Congo. Theory of Resource Curse, which the government is unable to properly manage natural resources and workers' lives. In fact, Congo government has internal problems so workers who has low status are not given attention to them. Violation rights of mining workers, especially child workers due to the exploitation of natural resources in the Congo region because of the world's interest need for "Green Technology". The involvement of several global companies in exploiting minerals wealth in Congo. This research is expected to enrich the scientific world and can be useful for researchers further research studies and for readers to learn.

Keywords: *Exploitation, Forced Labor, Congo, Green Technology*

PENDAHULUAN

Perkembangan "Green Economy" dalam menghadapi permasalahan lingkungan yang saat ini menjadi permasalahan *global* untuk dapat dituntaskan sekaligus mencari pengganti dari minyak bumi dengan menggunakan energi terbarukan yang lebih praktis dan mudah untuk dimanfaatkan negara. Namun sebagian negara – negara yang termasuk dalam kategori negara berkembang memiliki kesulitan yang cukup banyak dalam menghadapi transisi energi yang memakan waktu sangat cepat tanpa adanya bantuan secara pasti oleh negara – negara maju untuk dapat membantu transisi energi ini secara efektif dan berdampak. Republik Demokratik Kongo adalah salah satu negara yang memiliki banyak kekayaan bumi yang cukup besar dalam aspek minyak bumi dan mineral didalamnya.

Permasalahan ini menjadi gambaran besar ketakutan dari banyak negara di Benua Afrika bahwa negaranya akan dieksploitasi secara terus – menerus tanpa adanya manfaat bagi terlebih lagi di negara Kongo secara menyeluruh dan hanya memanfaatkan mineral di wilayah Afrika secara penuh. Ketakutan inilah yang membawa beberapa negara Afrika mulai mempertimbangkan kerjasamanya dengan negara – negara tertentu agar tetap mempertahankan mineralnya sekaligus mengembangkan teknologi tersebut secara masif agar dapat bermanfaat kembali bagi masyarakat secara besar. Tidak dapat dipungkiri bahwa Republik Demokratik Kongo saat ini merupakan salah satu wilayah yang dapat menjadi negara – negara terdepan dalam mengembangkan *green technology* secara menyeluruh dan bermanfaat bagi seluruh dunia.

China merupakan salah satu negara yang banyak menginvestasikan teknologinya ke wilayah Republik Demokratik Kongo secara menyeluruh. Namun hal yang menjadi ketakutan dari beberapa kebanyakan negara di dunia lainnya, karena China menginginkan kesempatan emas tersebut tidaklah sia – sia namun ini menjadi kesempatan yang akan mengembangkan kekuatan China secara besar terlebih berfokus pada teknologi yang dimana China memiliki kesempatan besar disini. Hal inilah yang terkadang tidak disadari oleh kebanyakan negara di wilayah Afrika bahwa banyak kesempatan ini telah dimanfaatkan oleh beberapa negara yang memiliki pengaruh besar dari banyak negara. Republik Demokratik Kongo yang merupakan negara dengan permasalahan pemanfaatan kekayaan sumber daya alamnya dihipit oleh banyak investasi dari negara – negara besar menjadi fokus bahwa Republik Demokratik

Kongo mengalami eksploitasi dari negara – negara besar dengan agenda “Green Techology” oleh dunia dengan pemanfaatan *lithiums* sebagai baterai kendaraan elektrik saat ini banyak dicari – cari oleh negara – negara diseluruh dunia tersebut. (Tecnode Feed, 2022)

Permasalahan ini melibatkan masyarakat Republik Demokratik Kongo dari setiap kalangan, mulai dari buruh hingga para peneliti yang ingin melibatkan perannya dalam pengembangan wilayah Kongo secara lebih meluas. Permasalahan ini mulai terlihat semenjak negara diwilayah Asia Tenggara memulai kontrolnya dalam semua mineral bumi yang dimiliki wilayahnya dengan melarang ekspor barang mentahnya kepada seluruh dunia untuk pengembangan teknologi dalam negeri. Hal ini membuat pasar Asia dalam hal mineral meningkat cukup drastis pada tahun 2021, yaitu sebesar 160\$ per ton yang membuat negara sangat bergantung pada pengembangan teknologi seperti Korea dan Jepang mengalami krisis energi. Beberapa negara akhirnya membuka pasarnya kembali namun dengan syarat barang setengah jadi atau jadi dengan produk yang akan diterima oleh beberapa perusahaan besar diseluruh dunia. (Foster S, 2022)

Pasar yang mulai berubah terhadap beberapa produk mineral seperti timah, bauksit, tembaga, lithium, emas dan sebagainya tersebut membuat beberapa negara mulai mencari pasar baru yang pasti dengan produk dengan harga yang lebih murah dan dapat diolah sendiri (barang mentah), agar beberapa negara masih mendapat keuntungan yang cukup besar dari perolehan pengolahan produk tersebut secara optimal dan pasti, terlebih dengan pasar baru yaitu pembuatan baterai bagi kendaraan listrik dikemudian hari dan ini merupakan kesempatan besar bagi beberapa produk kendaraan dunia untuk dapat mengimplementasikan teknologi tersebut dalam pasar global. (Foster S, 2022)

Mencari pengganti ditengah krisis energi dan transisi saat ini menjadi peluang yang besar bagi negara – negara utama yang bergerak pasti dalam bidang industri pembuatan baterai kendaraan tersebut. Namun ditengah krisis ini terdapat negara Kongo yang menjadi fokus utama beberapa negara untuk dapat melakukan Industri dalam bidang mineral, seperti contohnya pada perusahaan Gleencore yang berasal dari Swiss. Namun dalam pengembangannya terdapat banyak permasalahan yang terjadi didalam pengoptimalan industri mineral diwilayah Kongo tersebut, keterlibatan beberapa perusahaan didalam pemanfaatan mineral diwilayah Kongo ini menyebabkan permasalahan yang cukup berat

yaitu mengambil hak – hak masyarakat diwilayah Kongo dengan mengeksploitasi sumber daya alam (SDA) sekaligus keterlibatannya dalam tindakan kekerasan yang diterima oleh para pekerja tersebut. (Sguazzin A, 2022)

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan diidentifikasi adalah “Bagaimana Masyarakat Republik Demokratik Kongo dapat Memanfaatkan Teknologinya tanpa harus dieksploitasi kembali dengan Agenda Dunia yang berubah tersebut?”

KERANGKA BERPIKIR

Dalam hal ini penulis akan menggunakan teori liberalisme, teori liberalisme mengadopsi nilai – nilai kemanusiaan untuk mencapai kebahagiaan yang lebih besar daripada skema sosial alternatif yang diberikan oleh masyarakat dalam lingkungan tersebut. Teori ini berkembang dari para pemikir Inggris seperti Jeremy Bentham dan John Stuart Mill pada abad kedelapan belas dan kesembilan belas yang sangat berpengaruh pada waktu tersebut. Dalam hal tersebut tokoh – tokoh berikutnya seperti John Locke, Thomas Hobbes dan Samuel Pufendorf mengembangkan teori tersebut menjadi gambaran yang lebih luas yang dimana, manusia memiliki hak – hak dasar alamiah atas kebebasan yang terdiri dari hak untuk melakukan apa pun yang mereka anggap pantas untuk melindungi dan mengembangkan tanpa mengganggu hak orang lain kecuali hal tersebut mengancam pribadi. Hal inilah yang membuat Immanuel Kant memberikan gambaran tersebut kepada masyarakat dunia secara meluas dengan pembuktian bahwa pengembangan teori ini masih tetap relevan hingga saat ini. (Locke J, 1964)

Liberalisme adalah teori dan praktik tentang apa itu tatanan sosial dan politik yang adil. Sesuatu hal yang berkaitan dengan hak untuk memaksa orang untuk bertindak sesuai dengan persyaratan ketertiban yang adil. Liberalisme awal percaya bahwa hak ini dimiliki oleh negara. Fungsi penting dari negara yang adil adalah untuk menjamin kepada warga negara bahwa, jika mereka bertindak adil dengan mematuhi aturan negara yang adil, mereka tidak akan mengekspos diri mereka sendiri tanpa perlindungan yang wajar dari eksploitasi oleh yang tidak adil. Kaum anarkis liberal percaya bahwa hak untuk memaksa yang tidak adil dimiliki oleh setiap individu dan bahwa untuk mentransfer hak itu kepada negara berarti menempatkan diri sendiri secara bodoh kepada kelompok besar yang menghancurkan mereka. Kebanyakan kaum liberal, bagaimanapun, percaya bahwa mereka telah menemukan

metode untuk menjinakkan kelompok besar tersebut dan membuatnya sesuai dengan ide liberal. (Etinson A, 2018)

Dalam kasus ini kita melihat bahwa terdapat kesenjangan yang bisa dikatakan bahwa ini merupakan tindakan neokolonialisme yang berfokus pada pengembangan dan keuntungan bagi beberapa pihak saja namun masyarakat Kongo secara jelas bahwa terdapat pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilanggar dan hal ini secara tidak langsung mempertanyakan secara lebih luas tentang bagaimana hukum internasional sendiri harus bertindak dan terlibat dalam pemberian informasi bahwa terdapat pelanggaran yang terjadi pada masyarakat Kongo secara besar.

Permasalahan yang cukup besar tersebut terjadi karena adanya Right to Development (RTD) yang dimana negara – negara pertama ingin terlibat dalam membantu pengembangan negara – negara berkembang untuk dapat mengoptimalkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan dan Pendidikan. Namun kenyataannya dalam tulisan *“Introduction to Global Issues: Why Care About Global Issues?”*. Menurut mereka, hanya karena potensi konsekuensi dari kelambanan masalah ekonomi, sosial, keamanan, kesehatan dan lingkungan yang akan dihadapi jika negara maju tidak membantu negara berkembang. Negara maju harus memberikan bantuan pembangunan. “Kerjasama pembangunan” saat ini antara negara berkembang dan negara maju serta organisasi pembangunan internasional, didasarkan pada alasan yang sama. OECD berbicara tentang “perjanjian yang lebih kuat untuk kemitraan yang efektif”, yang akan mencakup: (i) tanggung jawab bersama mitra berkembang dan mitra eksternal; (ii) tanggung jawab negara berkembang; dan (iii) tanggung jawab mitra eksternal. (Piron, 2005) Tidak disebutkan RTD yang mengikat secara hukum; dan begitu juga pada Konsensus Monterey. (Bhagarva, 2006)

Apakah itu penting? Mungkin, seperti banyak masalah internasional lainnya (yang lingkungan menjadi contoh terbaik), komitmen hukum lunak negara terhadap kerja sama internasional dalam masalah pembangunan mungkin cukup untuk saat ini membantu kita bergerak menuju tujuan yang keduanya berkembang dan negara-negara maju seharusnya bercita-cita: realisasi semua hak asasi manusia. Namun pada kenyataannya kepentingan ini hanya berpihak bagi sebagian kelompok besar saja, yang akhirnya dengan komitmen yang lunak ini juga menyebabkan tidak berjalannya sesuai dengan perjanjian walaupun sudah

diawasi langsung oleh United Nations. Terlebih permasalahan saat ini mulai meluas karena pengembangan teknologi hijau juga menjadi masalah utama yang padahal percepatan ini juga akan menyebabkan krisis dan eksploitasi secara besar di Afrika terlebih negara Kongo juga sudah menjadi korban secara tidak langsung. Karena di negara Kongo yang bertempat pada wilayah Kasulo menjadi pusat pertambangan bagi perusahaan Glencore dan beberapa tanah yang sudah hancur karena perluasan lahan sekaligus bahan mentah yang belum diolah menyebabkan tanah rusak dan membuat rongga dalam cukup besar yang terkadang menurut masyarakat Kongo sendiri sering terjadi getaran yang hanya berfokus pada tempat – tempat tertentu dan masyarakat Kasulo sering membuat lubang didekat rumah untuk menghindari terjadinya bencana atau getaran yang dapat merusak rumah berada dekat diwilayah pertambangan tersebut.

Permasalahan ini juga melibatkan bahwa terbuktinya beberapa kelompok pekerja yang tidak mendapatkan perlakuan yang tidak baik dan terjadi korupsi dalam internal kelompok perusahaan Glencore. Kesaksian yang disampaikan oleh Departement of Justice dalam kasus tersebut bahwa, “Dalam kasus suap asing, Glencore International A.G. dan anak perusahaannya menyuap perantara korupsi dan pejabat asing di tujuh negara selama lebih dari satu dekade. Dalam skema manipulasi harga komoditas, Glencore Ltd. merusak kepercayaan publik dengan menciptakan tampilan palsu dari penawaran dan permintaan untuk memanipulasi harga mineral.” Laporan yang diterima oleh Business & Human Rights terdapat 12 perusahaan yang terlibat. Negara – negara Afrika saat ini benar – benar berusaha mendapatkan haknya kembali untuk dapat mengoptimalkan Sumber Daya Alam (SDA) dan memaksimalkan potensial masyarakatnya secara menyeluruh tanpa terlibat penuh dengan negara maju secara langsung. (Technology Mining, 2022)

Teori yang digunakan juga menggunakan teori *Resource Curse* yang merupakan gambaran secara jelas bahwa kenapa negara – negara yang memiliki sumber daya alam dan manusia yang begitu melimpah justru tidak dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki sekaligus juga terlalu banyak permasalahan dalam negeri yang akhirnya menyebabkan retaknya usaha yang sudah dibangun begitu lama. Republik Demokratik Kongo merupakan salah satu wilayah yang memiliki permasalahan ini yang akhirnya menghancurkan negaranya sendiri secara tidak sadar yang akhirnya harus menerima bahwa negaranya dieksploitasi dan

kesadaran itulah yang menjadi permasalahan dalam negeri yang meliputi pada korupsi, kolusi, dan sebagainya. Teori ini dapat menjadi acuan mengapa Republik Demokratik Kongo juga masih belum dapat mengembangkan negaranya secara penuh dan menyeluruh. Hal inilah juga menjadi acuan jelas bahwa kebebasan yang mendasarkan pada nilai kebebasan yang harus diperjuangkan oleh masyarakat Republik Demokratik Kongo secara menyeluruh karena ini melibatkan satu benua untuk menghadapi permasalahan yang benar – benar memasuki lingkup dunia Internasional dan harus memiliki tindakan tegas untuk selanjutnya Pemerintah dan masyarakat dapat memperjuangkan haknya untuk dapat memiliki independensi pengembangan negara yang semakin jelas dan berintegritas secara maksimal. (Sachs JD, 2001)

Republik Demokratik Kongo, salah satu deposit sumber daya alam terbesar di planet ini memberikan tingkat populasi miskin tertinggi. Di Afrika Sub-Sahara, pendapatan tahunan rata-rata seorang individu adalah \$ 271, menurut Bank Dunia. Pertanyaan yang harus diajukan adalah, bagaimana mungkin suatu wilayah dengan kekayaan seperti itu dalam kemiskinan. Dalam penelitian terbaru, telah ditunjukkan ada korelasi tinggi antara negara-negara yang memiliki sejumlah besar sumber daya alam dan memiliki ekonomi yang buruk, ini disebut teori sumber daya. Davis mengatakan "kegagalan banyak negara kaya sumber daya untuk mendapat manfaat sepenuhnya dari kekayaan sumber daya alam mereka, dan bagi pemerintah di negara-negara ini untuk menanggapi kebutuhan kesejahteraan publik secara efektif." Tata kelola dan korupsi yang buruk adalah salah satu penyebab utama kutukan sumber daya di beberapa negara dunia termasuk di Republik Demokratik Kongo. (Davis GA, 2005)

Untuk mengatasi masalah ini, perlu bagi orang Republik Demokratik Kongo untuk melakukan jalan yang berbeda. Bagaimanapun, masih ada tim yang kalah dalam kasus ini. Tidak hanya ada masalah lingkungan yang berkembang dari waktu ke waktu, tetapi juga pertumbuhan ekonomi mereka dirusak. Tom Burgis mengklaim bahwa \$ 333 miliar bahan baku diekspor tetapi hanya \$ 15 miliar pengembalian setiap tahun, semua karena korupsi yang ada disebagian wilayah Afrika secara menyeluruh.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang hendak dikaji, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang berupa penjelasan dengan menggunakan fakta-fakta yang memanfaatkan data sekunder. Metode penelitian kualitatif bermaksud untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dalam menganalisis fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Dalam penjelasannya, Mohtar Mas'ued mengatakan metode deskriptif merupakan upaya dalam melaporkan apa yang terjadi, bahwa deskripsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sains sehingga biasa dilakukan sebelum eksplanasi dan prediksi. (Mas'ued, 1994)

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka. Kegiatan studi pustaka dalam penelitian ini dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Cara pengumpulan data dengan teknik penelitian kepustakaan (library research), yakni melalui pengumpulan data sekunder atau data verbal yang diperoleh dari hasil penelitian terdahulu.
- b. Mengumpulkan data-data baik berupa jurnal, buku-buku literatur, dan berita yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti di berbagai perpustakaan maupun data online yang bersumber dari internet.

3. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data dilakukan secara deskriptif, dan analisis dilakukan untuk menerangkan bagaimana sesuatu bisa terjadi dengan menghimpun fakta-fakta yang dilakukan secara sistematis. Data-data yang didapatkan kemudian dianalisis menggunakan kerangka berfikir yaitu teori konstuktivis.

PEMBAHASAN

China dan Afrika (Kongo) memiliki sejarah panjang. Selama masa pemerintahan Leopold, pekerja China dikirim ke Kongo untuk membantu membangun jalur kereta api nasional. Pada tahun 1970-an, Mobutu beralih ke rezim Mao untuk kolaborasi teknis dalam proyek-proyek infrastruktur. Pada tahun 90an, orang China menjadi bos: pemerintah Beijing

dan segudang bisnis China mulai melakukan investasi besar-besaran di Republik Demokratik Kongo, terutama di negara-negara kaya sumber daya dan miskin peraturan seperti Republik Demokratik Kongo. Peter Zhou, seorang pemodal kelahiran China yang telah mengerjakan beberapa kesepakatan pertambangan di Kongo, mengatakan bahwa di negara-negara seperti itu "ada korupsi, ada kekurangan supremasi hukum, yang memberi Anda lebih banyak otonomi untuk menjadi wirausaha." (Zhou menekankan bahwa dia tidak secara langsung menyaksikan atau terlibat dalam korupsi). Pada tahun 2007, Joseph Kabila membuat kesepakatan infrastruktur USD 6 milyar dengan China yang mencakup ketentuan yang memungkinkan China untuk mengekstraksi 600.000 ton kobalt. (The New Yorker, 2021)

Dalam menjalankan ekonomi hijau dengan menggunakan kobalt untuk baterai dan lithium untuk panel surya, perangkat elektronik, dan mobil listrik. Namun dalam menjalankan ekonomi hijau tersebut ternyata terdapat sisi gelapnya yaitu eksploitasi anak-anak di Negara Republik Demokratik Kongo. Mereka dipaksa bekerja dibawah kondisi yang berbahaya untuk menambang kobalt. Sekitar 40.000 anak-anak di Kongo yang bekerja keras di tambang artisanal yang tidak diatur dalam kondisi berbahaya. Tambang artisanal berporos sempit dan digali ke dalam tanah, kemudian anak-anak dapat masuk ke poros atau lubang sempit tersebut, hal ini menjadi sebab anak-anak direkrut dan dipaksa untuk bekerja. Mereka hanya menggunakan tangan mereka tanpa menggunakan peralatan pelindung untuk mengekstraksi kobalt dan mineral lainnya.

Salah satu wilayah tempat pertambangan yaitu di Kasulo yang dimiliki oleh perusahaan China DONGFANG CONGO MINING. Anak-anak yang bekerja sering terpapar mineral radioaktif, cedera, penyakit mematikan, menyakitkan ketika mereka bekerja untuk mengekstrak bijih hasil tambang. Mereka bahkan ada yang tidak dibayar dan dieksploitasi atas pekerjaan yang mengakibatkan fatal karena merangkak ke dalam lubang kecil yang digali di dalam bumi. Mereka bekerja tujuh hari dalam seminggu dan lebih dari 12 jam sehari. Mereka menggunakan alat seperti palu, pahat, dan sekop. Kondisi kerja mereka seperti perbudakan. Cedera, terluka, dan sakit merupakan hal yang sudah biasa, bahkan mayoritas pekerja meninggal karena tidak diobati.

Keadaan pekerja anak dan pelanggaran hak asasi manusia saat ini di sektor pertambangan Kongo "sangat kritis", kata seorang imam Yesuit di sidang DPR baru-baru ini

yang menyelidiki tuduhan bahwa Tiongkok mengeksploitasi anak-anak di Republik Demokratik Kongo dalam penambangan kobalt, litium, dan berbagai mineral tanah jarang. Kongo memproduksi lebih dari 70% kobalt dunia, yang bersama dengan mineral lainnya, digunakan dalam komponen untuk smartphone, kamera digital, hard disk komputer, televisi layar datar, monitor komputer, dan perangkat berteknologi tinggi lainnya. Pastor Yesuit Rigobert Minani Bihuzo, koordinator regional Jaringan Gerejawi Hutan Cekungan Kongo, adalah salah satu dari beberapa saksi pada sidang 15 Juli 2022 Komisi Hak Asasi Manusia Tom Lantos dari Kongres AS.

"Di belakang pekerja yang diperdagangkan dan pekerja anak, Tiongkok mengeksploitasi sumber daya kobalt yang luas dari DCR (Kongo) untuk mendorong ekonomi dan agenda globalnya," kata Perwakilan Chris Smith, NJ, yang menjalankan sidang sebagai ketua bersama komisi itu. "Semua laporan survei lapangan menyesalkan fakta bahwa mayoritas tambang menggunakan anak-anak dalam berbagai tugas. Ini dilakukan sementara undang-undang Kongo dan standar internasional melarang pekerja anak," katanya, seraya menambahkan bahwa anak laki-laki dan perempuan "Yang awalnya datang ke tambang untuk mendapatkan uang untuk sekolah mereka, akhirnya putus sekolah."

Saksi lainnya yaitu Hervé Diakiese Kyungu, seorang pengacara hak-hak sipil Kongo terkemuka yang sebelumnya mewakili korban tentara anak di hadapan Mahkamah Internasional. Beliau mengkonfirmasi penggunaan pekerja anak di tambang-tambang ini dan mencatat "cara baru penjajahan". Di Kongo selatan, di sebuah situs yang dikelola oleh perusahaan Commus milik Tiongkok, dia berkata, "dua orang yang diidentifikasi sebagai warga negara Tiongkok, menginstruksikan dua perwira militer Kongo untuk mencambuk dua orang Kongo yang ditemukan di situs tambang mereka."

Saksi selanjutnya adalah Eric Shultz, mantan duta besar AS untuk Zambia, yang mengatakan bahwa "China menggunakan pendekatan yang sama di Negara Republik Demokratik Kongo: memicu otoritarianisme, korupsi, dan in-efisiensi ekonomi." "Kami dalam arti yang sangat nyata berperang dengan China di Afrika dan Rusia juga dalam hal ini atau lebih tepatnya mereka berperang dengan kami," kata Shultz. (Business Human Rights, 2022)

Orang Kongo yang bekerja di tambang yang dikelola China mengatakan bahwa atasan mereka sering kali rasis. Seorang penerjemah Kongo yang berbicara bahasa Mandarin mengatakan, "Orang-orang China datang ke sini untuk bisnis untuk menghasilkan uang, sehingga mereka tidak akan pernah bisa menjadi teman kita." Dia telah mendengar majikan China berkata tentang orang Kongo, "Orang-orang ini, mereka tidak benar-benar berpikir". Nicolas Niarchos dari *The New Yorker* bertanya kepada Ziki (penduduk Kongo) bagaimana pendapatnya tentang orang-orang yang mendapat untung dari penambangan kobalt?. "Saya memiliki kesedihan di hati saya ketika saya memikirkan orang-orang yang membeli hasil tambang," katanya. "Mereka menghasilkan begitu banyak uang, dan kita harus tetap seperti ini." Ketika saya mengatakan kepadanya bahwa orang Amerika membayar lebih dari seribu dolar untuk iPhone terbaru, dia menjawab, "Sungguh menyakitkan bagi saya untuk mendengarnya". Kemudian dari perusahaan yang menggunakan baterai *lithiumion* secara berkala menanggapi tekanan publik tentang kondisi di tambang kobalt dengan berjanji untuk membersihkan rantai pasokan mereka dan berinovasi keluar dari masalah tersebut. Ada juga insentif finansial untuk melakukannya: kobalt adalah salah satu elemen baterai yang paling mahal.

Dengan demikian, Masyarakat Republik Demokratik Kongo dapat memanfaatkan teknologinya tanpa harus dieksploitasi kembali dengan Agenda Dunia yang telah berubah, dari negara-negara maju perlu perlengkapan sebuah upaya pemerintah Republik Demokratik Kongo melalui transfer teknologi. Memang menyedihkan ketika, beberapa perusahaan yang telah beroperasi di Republik Demokratik Kongo selama beberapa dekade namun masih mentransfer teknologi ini ke Republik Demokratik Kongo. Akibatnya, orang Afrika diturunkan menjadi budak daripada peserta dalam teknologi. Perbudakan akan bertahan jika tren ini berlanjut. Ini karena teknologi merupakan "*Technology is the mother of development, and development is anathema to slavery*". Dengan demikian, membiarkan teknologi masuk ke suatu daerah-daerah di Republik Demokratik Kongo akan mendorong pembangunan yang akan mengakhiri perbudakan. Negara-negara maju, karena mereka memiliki andil di Republik Demokratik Kongo yang terbelakang, tidak peduli seberapa jauh ini, memiliki kewajiban moral untuk berkontribusi pada pembangunan Republik Demokratik Kongo. Kebijakan transfer teknologi harus beroperasi di negara Republik Demokratik Kongo adalah salah satu strategi untuk memastikan bahwa teknologi tidak selamanya dijauhkan dari orang Republik

Demokratik Kongo, seperti yang saat ini terjadi agar menghilangkan keterbatasan ada sehingga dapat menuju peningkatan dan penguasaan teknologi. (Esirah, 2021)

Pada Desember 2019, pengacara dari International Rights Advocates, sebuah firma hukum di Washington, DC, menggugat Apple, Google, Dell, Microsoft, dan Tesla atas keterlibatan dalam cedera atau kematian penambang anak. "Anak-anak ini bekerja di kondisi untuk upah yang remeh, dan dengan risiko yang sangat besar, untuk menyediakan kobalt", tuduh pengaduan itu. Seorang ibu Kongo yang putra dan sepupunya meninggal saat bekerja di tambang kobalt di Republik Demokratik Kongo, memberikan pernyataan "*Our children are dying like dogs*", dia dan orang tua lainnya yang mengalami hal sama merupakan gugatan dari *class action* (aksi kelas) yang mengajukan ke pengadilan federal AS di Washington, DC, tahun 2019. Mereka berusaha meminta pertanggungjawaban Apple, Alphabet (perusahaan induk Google), Dell Technologies, Microsoft, dan Tesla atas apa yang mereka lakukan untuk mendapatkan keuntungan dari kesengsaraan pekerja anak ketika pencarian kobalt. (Deseret News, 2021) "Ratusan miliar dolar yang dihasilkan oleh Para Tergugat setiap tahun tidak akan mungkin didapat tanpa kobalt yang ditambang di D.R.C."

Dari laporan 2016, berjudul "*This Is What We Die For Human Rights Abuses in the Democratic Republic of Congo Power the Global Trade in Cobalt*," mengatakan secara luas bahwa diakuinya dalam skala internasional tentang keterlibatan anak-anak dalam pertambangan merupakan salah satu bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, yang harus dilarang dan dihilangkan oleh pemerintah.

Meskipun perusahaan seperti Apple pada 2016 telah mempromosikan program *volunteer* (sukarela) di mana pelanggaran hak asasi manusia dalam pasokan untuk kobalt dapat dilaporkan, pada gugatan akhir 2019 tersebut berpendapat, bahwa program ini hanyalah *lip service* (janji yang berpura-pura). Kemudian dari perusahaan yang menggunakan baterai *lithium-ion* secara berkala menanggapi tekanan publik tentang kondisi di tambang kobalt dengan berjanji untuk membersihkan rantai pasokan mereka dan berinovasi keluar dari masalah tersebut. Ada juga insentif finansial untuk melakukannya: kobalt adalah salah satu elemen baterai yang paling mahal.

Menurut perspektif masyarakat Kongo permasalahan ini memang menimbulkan permasalahan yang cukup rumit karena berawal dari permasalahan diwilayah Kasulo yang pada tahun 1990an Presiden yang saat itu memimpin Mabutse Sese Seko menerima proposal yang diberikan oleh Amerika Serikat dalam pengembangan pertambangan diwilayah Kasulo yang saat itu sudah diketahui bahwa beberapa masyarakat lokal sudah melakukan pertambangan secara mandiri sebagai bisnis rumahan yang menguntungkan masyarakat umum diwilayah tersebut. Namun, ternyata perkembangan tambang yang dijalankan oleh Glencore telah mendapatkan izin resmi dari tahun 1995. Perkembangan tersebut juga menjadi senjata yang menghancurkan Kongo itu sendiri. Pada tahun 2001, Putra dari Laurent-Desire Kabila yang bernama Joseph menjual aset Gécamines karena banyaknya pekerja Kongo yang tidak mendapatkan gaji selama lebih dari 3 tahun kepada Glencore dan mendapatkan hak pertambangan yang lebih luas diwilayah Kasulo. (New York Times, 2019)

Tindakan ini telah menyebabkan wilayah Kasulo menjadi tanah gersang yang diliputi warna merah sekaligus kehilangan kandungan nutrisi tanah tersebut karena seringnya digunakannya bahan peledak untuk membuka lahan baru untuk pertambangan. Pada Juni tahun 2019 pertambangan milik Glencore diwilayah Kolwezi mengalami longsor yang menyebabkan 40 pekerja meninggal dalam tambang tersebut. Namun, selanjutnya pertambangan itu tetap berlanjut untuk hari – hari berikutnya. (Amnesty International, 2016). Permasalahan ini yang menjadi tindakan yang membuat masyarakat geram dan mulai mempersiapkan kelompok tertentu yang memastikan bahwa ada bukti yang menguatkan perusahaan besar dan pemerintahan untuk dapat menindaklanjuti permasalahan ini secara serius karena hampir diseluruh wilayah dekat pertambangan mengalami kehancuran karena bahan mentah yang menghancurkan nutrisi tanah yang menjadi tempat untuk menanam kebutuhan sehari – hari masyarakat Kongo dalam memenuhi pangannya dalam beberapa bulan kedepan

Pada masa Covid-19, masyarakat Kongo bagian Selatan melakukan tindakan demonstrasi kepada Pemerintah Kongo dan membakar banyak sampah didepan Gedung pemerintahan untuk meminta kepastian dengan kejadian yang terjadi di Kolwezi dengan bekerjasama dengan kelompok *Protect Whistleblowers in Africa* yang membocorkan sebuah data besar yang dilakukan oleh Richard Mueej dengan uangnya yang dipindahkan ke negara

Kamerun untuk dapat mengakui bahwa ada tindak korupsi yang melibatkan pertambangan ini menjadi semakin besar diwilayah Kongo dan merusak ekosistem yang berada dekat dengan penduduk. Menurut *Radio France Internationale*, keterlibatan ini akhirnya ditindak oleh Pemerintah Kongo saat ini dengan beberapa bukti yang menguatkan namun permasalahan ini belum juga menentukan hasil yang baik dan memuaskan untuk masyarakat karena banyaknya wilayah yang sudah tercemar dari hasil limbah pertambangan yang cukup merusak ekosistem yang membuat masyarakat Kongo diwilayah seperti Kolwezi dan Kasulo harus berpindah karena tidak mendapatkan kecukupan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari.

Pada bulan Juni 2022, Parlemen Eropa akan menetapkan kebijakan larangan penjualan mobil baru menggunakan bensin atau diesel pada tahun 2035. Jika disetujui oleh Uni Eropa, langkah itu akan merevolusi pasar mobil terbesar ketiga di dunia setelah China dan Amerika Serikat dan mempercepat transformasi global seluruh industri otomotif ke teknologi baterai. Hal yang tidak disebutkan oleh anggota parlemen yaitu Dunia tidak dapat menambang dan memurnikan sejumlah besar mineral yang masuk ke baterai (litium), nikel, kobalt, mangan, paladium, dan lainnya di mana saja mendekati skala transisi cepat ke kendaraan listrik (EV) ini terjadi. Rahasia kotor revolusi hijau adalah kelaparannya yang tak terpuaskan akan sumber daya dari Republik Demokratik Kongo dan tempat lain yang diproduksi menggunakan beberapa teknologi paling kotor di dunia.

Terlebih lagi, peralihan sumber daya tak terbarukan ke baterai (lithium) yang dipercepat sekarang, hingga mengancam untuk meniru salah satu dinamika paling destruktif dalam sejarah ekonomi global yaitu ekstraksi komoditas mentah dari negara-negara miskin dan rakyatnya kesusahan, namun memiliki kekayaan alam yang melimpah yang tidak dimanfaatkan sehingga membuat negara-maju yang kaya mengeksploitasinya, hingga meninggalkan meninggalkan jejak degradasi lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia, dan keterbelakangan.

Logam baterai (*Lithium*) memiliki signifikansi strategis dalam banyak hal yang mirip dengan peran sentral yang telah lama dimainkan oleh minyak. Saat ini Republik Demokratik Kongo merupakan mengendalikan cadangan kobalt terbesar di dunia yang diketahui logam baterai yang telah muncul sebagai kunci *Green transition* (transisi hijau), paling tidak karena

baterai EV yang diproduksi dengan kobalt cenderung memungkinkan jarak mengemudi yang lebih jauh di antara pengisian daya. (Foreign Policy, 2022)

Program Mobilitas Listrik Global UNEP merupakan beberapa proyek negara untuk memperkenalkan dan meningkatkan penyerapan mobilitas listrik di lebih dari 40 negara berpenghasilan rendah dan menengah di seluruh dunia. Dua belas dari proyek negara ini berlokasi di Afrika. Program ini berupaya membangun kapasitas, mengembangkan strategi dan peta jalan nasional untuk mendukung peralihan ke mobilitas listrik, merancang kebijakan, dan menetapkan model bisnis dan skema keuangan yang layak untuk mendukung transisi yang lancar dan pergeseran menuju mobilitas listrik. Dan sementara bantuan teknis untuk memperkenalkan e-mobilitas di Afrika adalah kuncinya, demonstrasi teknologi ini sama pentingnya. Untuk alasan ini, proyek-proyek negara mengintegrasikan proyek-proyek demonstrasi utama untuk menghasilkan pengetahuan di lapangan dan untuk memberikan pengalaman yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kepercayaan pada pemodal, seperti bank pembangunan, dana hijau dan modal ventura untuk berinvestasi dalam proyek-proyek e-mobilitas ini. (UNEP, 2021)

Perkembangan Afrika dalam sektor energi tersebut saat ini benar – benar mengalami perkembangan pesat pada tahun 2010 – 2020 dengan peningkatan 50%. Kebutuhan energi tersebut juga menjadi fokus utama program UNEP yaitu mengembangkan mobilitas kendaraan dengan energi terbarukan dengan potensi yang dimiliki di Republik Demokratik Kongo. UNEP menyampaikan bahwa pergantian energi tersebut karena sebagian negara di Republik Demokratik Kongo sudah memanfaatkan panel surya, pembangkit energi panas bumi, penggunaan penggerak angin untuk menyebarkan listrik di wilayah Afrika. UNEP percaya bahwa negara Republik Demokratik Kongo bisa melakukan pergantian energi secara cepat karena sebagian besar sudah benar – benar bisa memanfaatkan teknologi yang berbasis pada melindungi lingkungan alam termasuk dengan pengembangan pada aspek kendaraan dan mobilitas tersebut akan digunakan oleh masyarakat dunia dengan menggunakan mobil listrik dan mengurangi emisi karbon yang disebabkan penggunaan minyak bumi yang berlebih.

Walaupun potensi tersebut merupakan jalan panjang hingga tahun 2040 dengan menyesuaikan program yang diberikan oleh COP26, Kongo sangat mungkin untuk

mengembangkan segala potensi yang dimiliki. Namun apakah mungkin jika Kongo yang merupakan negara dunia ketiga tersebut memiliki potensinya sendiri dari tiap – tiap negara untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki karena saat ini Kongo benar – benar mengalami rujukan bagi negara dunia pertama untuk menghadapi permasalahan dunia saat ini dengan mengubah potensi pasar yang sebelumnya menggunakan minyak bumi dan transisi dengan menggunakan energi listrik dan baterai. UNEP meyakinkan Kongo merupakan kunci bagi negara – negara dunia lain untuk dapat dan bisa mengembangkan potensi yang dimiliki karena energi tersebut bisa dilakukan dengan murah dengan manfaat yang didapat begitu banyak dan bermanfaat bagi lingkungan. Permasalahan Republik Demokratik Kongo yang dihadapi semenjak dahulu adalah pemanfaatan yang dimiliki oleh pihak diluar masyarakat Republik Demokratik Kongo itu sendiri termasuk dalam pembelian minyak bumi Republik Demokratik Kongo bisa dikatakan sangatlah mahal karena tidak memiliki akses sama sekali dan hal itulah yang menyebabkan Kongo harus mengembangkan teknologi yang dimiliki untuk masyarakatnya sendiri dengan memaksimalkan potensi pemuda dan teknologi yang dimiliki oleh negaranya.

Kita harus benar – benar memperhatikan tentang segala program yang diberikan oleh UNEP tentang Program Mobilitas Listrik Global tersebut secara merinci karena secara kapasitas hal ini benar – benar industri yang cukup besar jika benar – benar bisa dimanfaatkan langsung oleh Republik Demokratik Kongo namun dengan begitu banyak kebijakan dunia yang membatasi Republik Demokratik Kongo untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki tersebut bisa menjadi potensi baru yang dilakukan oleh beberapa negara untuk mengambil manfaat dan potensi Sumber Daya Alam sekaligus Sumber Daya Manusianya untuk dapat dieksploitasi secara besar. Hal ini juga merujuk pada kejelasan pemerintah Republik Demokratik Kongo secara menyeluruh yang harus berintegrasi secara bersamaan agar memiliki tujuan yang sama agar tidak berdampak kepada masyarakat secara menyeluruh. Pada faktanya kita juga merujuk pada teori kutukan sumber daya alam yang dimiliki beberapa negara berkembang, bahwa banyak permasalahan ini juga mendasari didalam negara itu sendiri.

Korupsi pada negara berkembang yang terjadi di semua tingkatan masyarakat telah sangat mengganggu ekonomi banyak negara yang terbelakang. Karena banyak perusahaan

Barat sangat tergantung pada bahan baku benua Afrika, beberapa masyarakat lebih memprioritaskan permainan pasar tersebut di dalam korupsi. Salah satu yang paling umum adalah korupsi birokrasi, itu adalah ketika pejabat pemerintah menetapkan cara melalui sistem politik untuk mengumpulkan kekayaan bagi diri mereka sendiri. Salah satu contohnya mantan negara presiden negara, Joseph kabila yang telah diinvestigasi dengan skandal korupsi sebesar 138 juta dollar selama lima tahun antara 2013 hingga 2018. Yang awalnya dana tersebut untuk proyek-proyek infrastruktur yang sangat dibutuhkan di Kongo namun masuk ke rekening pribadi presiden, keluarganya, dan melalui perusahaan cangkang Congo Contruction Company (CCC). Kemudian terdapat dua perusahaan China yang menyogok jutaan dollar ke rekening yang dikendalikan oleh keluarga presiden agar mendapat akses ke kekayaan di Kongo yang mencapai miliaran dollar. Para pemimpin di Negara Republik Demokratik Kongo dan perusahaan asing terlibat dalam kegiatan untuk mencuri sumber daya alam, dan membuat masyarakat menerima tangan kosong atas usaha yang telah benar – benar diberikan atau Sumber Daya Alam yang diambil. Banyak dampak yang terjadi seiring waktu. Serangan balik masyarakat terhadap pemerintah, yang kadang -kadang mengarah pada penghancuran fasilitas publik. Kemudian masyarakat tenggelam dalam lebih banyak kemiskinan karena dalam proses penurunan dan eskalasi politik yang semakin memanas di salah satu wilayah menyebabkan kekurangan banyak hal yang berdampak juga terhadap masyarakatnya itu sendiri.

Banyak dari ekonomi negara berkembang ini didasarkan pada sumber daya alam. Ini dapat memiliki dampak negatif pada negara -negara ini. Perusahaan yang membeli sumber daya alam, tidak hanya memperluas ketidaksetaraan kekayaan, juga mengurangi produktivitas warga ketika tidak ada sistem yang ada untuk mengatur pendapatan negara.

Sementara negara - negara industri yang kaya di Utara harus disalahkan atas sebagian besar krisis iklim, negara - negara Global Selatan yang menderita beban konsekuensi, seperti banjir, naiknya permukaan laut, kekeringan, dan panas.

Permintaan global Selatan untuk Konferensi Iklim tahun ini, adalah agar Global North akhirnya membayar kerusakan yang disebabkan di masa lalu dan akan menyebabkan di masa depan - dana iklim untuk mendukung negara -negara yang paling terpengaruh oleh krisis. Permintaan yang ditolak secara tegas oleh Barat pada Konferensi Iklim Terakhir. Sejauh

tahun 2009, negara - negara industri menjanjikan pembayaran tahunan sekitar 100 miliar dolar mulai tahun 2020 sebuah janji yang masih belum terwujud hingga saat ini. (Limb & Frost, 2022)

Negara Barat berutang hutang yang tak terduga kepada seluruh dunia. Tidak hanya untuk efek perubahan iklim yang sudah berbahaya tetapi juga eksploitasi historis global Selatan. Kolonialisme, perbudakan, perang dan kudeta yang tidak dapat dibenarkan, sanksi ekonomi, perdagangan yang tidak adil, dan neokolonialisme yang dimulai pada tahun 1970-an memiskinkan dunia sambil membiarkan Barat hidup dalam kemewahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hutang yang dibawa oleh masyarakat Republik Demokratik Kongo tidak dapat dimasukkan ke dalam angka. Di mana orang akan mulai dihitung?

Para ahli percaya bahwa emisi global gas rumah kaca yang merusak iklim harus dipotong setengah pada tahun 2030. Jika tidak, mereka berpendapat, tujuan membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celcius di atas tingkat pra-industri tidak dapat dicapai. Pada kenyataannya, jauh lebih mungkin mengalami pemanasan 2,5 hingga 3,0 derajat Celcius atau lebih; Dan kami tidak tahu bagaimana bertahan hidup di dunia seperti itu. Pemanasan hari ini sekitar meningkat 1,0 derajat Celcius, dan semua bencana dan krisis yang dihasilkan, jelas menunjukkan hal ini.

Jalan menuju bencana tidak akan mudah; Sebaliknya, ini akan menjadi serangkaian pasang surut dengan dataran tinggi dan periode stabilisasi di antaranya. Namun, ketika keadaan krisis menjadi norma, kekerasan politik dan propaganda dari semua pihak akan meningkat. Rezim fasis akan naik dan turun sementara kapitalisme liberal berjuang untuk menemukan kembali dirinya sendiri dan melestarikan kebebasannya dalam kehidupan sosial saat ini yang memasuki kategori gagal. Satu - satunya jalan keluar adalah jenis perubahan transformasional yang tidak terlihat dalam satu abad. Saat ini, bencana tampaknya lebih mungkin dan akan sering terjadi dan lebih parah lagi daripada bencana sebelumnya. (Mckie, 2022)

KESIMPULAN

Jika pemerintah Republik Demokratik Kongo tidak berjuang untuk rakyatnya, maka perusahaan asing tidak tertarik untuk melakukannya. Sebaliknya mereka mencari di mana

minat paling sesuai dan terlibat dalam kegiatan penipuan dengan pejabat pemerintah. Perusahaan menargetkan negara - negara yang tidak stabil dan miskin secara ekonomi. Kemiskinan dan kurangnya pendidikan adalah sedikit dari banyak penyebab korupsi ini. Korupsi, yang terjadi di semua tingkatan, sangat mengacaukan ekonomi negara -negara terbelakang ini. Karena banyak perusahaan Barat sangat bergantung pada bahan baku benua itu. Karena itu, mereka bermain dalam berbagai bentuk korupsi. Paling umum adalah korupsi birokrasi, itu adalah ketika pejabat pemerintah menetapkan undang -undang dan kebijakan melalui sistem politik untuk mengumpulkan kekayaan bagi diri mereka sendiri. Dalam banyak kasus, perusahaan besar yang terlibat dengan para pejabat menerapkan kebijakan yang akan membantu mereka mengakses sumber daya alam dengan mudah dan dengan harga yang lebih murah. Ini menunjukkan sejauh mana perusahaan -perusahaan ini kurang peduli tentang kemakmuran rakyat.

Takdir dan kemakmuran negara - negara miskin ini sangat bergantung pada tindakan pemerintah mereka. Dalam ekonomi yang tumbuh seperti itu di seluruh dunia, persaingan ekonomi dengan negara -negara lain secara harfiah tidak mungkin bagi negara -negara miskin ini. Ada juga dampak ekologis yang berasal dari ekstraksi sumber daya, yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kondisi kehidupan masyarakat. Pemerintah harus mengkompensasi praktik ini dan memastikan bahwa warganya tidak terkena dampak negatif, tetapi ini tidak pernah terjadi. Adalah keyakinan saya bahwa pemerintah yang gagal ini adalah penyebab utama kutukan sumber daya. Jika pemerintah dengan tepat menggunakan otoritas mereka dan melaksanakan misi mereka, negara -negara ini akan melihat pertumbuhan ekonomi alih - alih penurunan. Dan juga, otoritas dan kekuatan pemerintah ini akan tumbuh di panggung dunia.

Untuk mengatasi masalah ini, perlu bagi negara - negara Afrika untuk secara kolektif melakukan jalan yang berbeda. Mereka harus memahami dalam kedua kasus mereka adalah tim yang kalah karena pertumbuhan ekonomi mereka dirusak dan ada masalah lingkungan yang akan berkembang seiring waktu. Lembaga, hukum, dan kebijakan dapat mengubah jalannya. Langkah pertama adalah menciptakan kelompok regional negara - negara Afrika yang terkena dampak kutukan sumber daya. Sama seperti AS, mereka akan mengenakan pajak untung rejeki secara besar - besaran, meninjau dan menegosiasikan kembali kontrak

untuk memaksimalkan manfaatnya; Semua pendapatan dari sumber alami hanya boleh digunakan untuk pengembangan publik. Cara terbaik Republik Demokratik Kongo untuk dapat terlepas dari jeratan ini adalah dengan mengembangkan metode berbeda yang mendasar dari nilai – nilai masyarakat dan mengembangkannya dengan nilai benua Afrika secara menyeluruh dan hal ini yang selanjutnya menjadi jalan pembeda sekaligus menghilangkan nilai – nilai kolonialisme yang selama ini sudah berjalan hingga saat ini. (Malley, 2015)

DAFTAR PUSTAKA

A, Etinson. (2018). *Human Rights: Moral or Political*. Oxford University Press.

Amnesty International. (2016). *"Democratic Republic of Congo: "This is what we die for": Human rights abuses in the Democratic Republic of the Congo power the global trade in cobalt"*.

<https://www.amnesty.org/en/documents/afr62/3183/2016/en/>

"Are children 'dying like dogs' in effort to build better batteries?."

<https://www.deseret.com/utah/2021/5/23/22441889/our-children-are-dying-like-dogs-congo-slave-labor-cobalt-lawsuit-apple-tesla-human-rights-dell>.

A, Sguazzin. (2022). *"Glencore Rights Record Worst in Green Metals, Group Says"*. Bloomberg.

<https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-04/glencore-human-rights-record-worst-in-green-metals-group-says?sref=uMuyuNij>.

Bhagarva. (2006). *"Global Issues for Global Citizens: An Introduction to Key Development Challenges"*. World Bank. Hal 18.

"DRC: House hearing investigates accusations that China is exploiting" 22 Jul. 2022,

<https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/drc-house-hearing-investigates-accusations-that-china-is-exploiting-children-in-africa-in-the-mining-of-cobalt-lithium-and-various-rare-earth-minerals/>.

Esirah, Stella Bassey, (2021). 'Slavery In Postcolonial Africa: The Role Of Technology', *Journal of Public Administration and Government*, 3.1 58–65

<https://103.245.72.35/index.php/JPAG/article/view/155>.

Feed, Tecnode. (2022). *"CATL the biggest EV battery maker in the world in 2021, with 32.6% of market share"*. Tecnode.

<https://technode.com/2022/02/08/catl-the-biggest-ev-battery-maker-in-the-world-in-2021-with-32-6-of-market-share/>.

Foster S. (2022). *"Indonesia bans mineral exports to move up value chain"*. Asia Times.

<https://asiatimes.com/2022/02/indonesia-bans-mineral-exports-to-move-up-value-chain/>.

GA, Davis, Tilton JE. 2005. *"The resource curse. Natural Resources Forum 29(3):233–242."*
<http://search.proquest.com/docview/211190075>.

"Global Electric Mobility Programme | UNEP - UN Environment Programme."
<https://www.unep.org/explore-topics/transport/what-we-do/global-electric-mobility-programme>.

"Green Energy's Dirty Secret: Its Hunger for African Resources." 30 Jun. 2022,
<https://foreignpolicy.com/2022/06/30/africa-congo-drc-ev-electric-vehicles-batteries-green-energy-minerals-metals-mining-resources-colonialism-human-rights-development-china/>.

JD, Sachs, Warner AM. (2001). *"The curse of natural resources. European Economic Review"*.
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014292101001258>.

J, Locke. (1964). *Two Treatises of Government*. Cambridge University Press.

Lottie Limb & Rosie Frost. (2022). *"COP27: Egypt can act as a 'bridge' between Global North and South, says chief climate negotiator"*. Euronews.
<https://www.euronews.com/green/2022/10/16/cop27-egypt-can-act-as-a-bridge-between-global-north-and-south-says-chief-climate-negotiat>.

Mailey, J.R.. (2015). *"The Anatomy of the Resource Curse: Predatory Investment in Africa's Extractive Industries"*. Africa Center for Strategic Culture.

Mckie, Robin. (2022). *"Cop27 climate summit: window for avoiding catastrophe is closing fast"*. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/environment/2022/oct/30/cop27-climate-summit-window-for-avoiding-catastrophe-is-closing-fast>.

Mochtar Mas'oed. (1994). *"Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi"*, PT Pustaka LP3ES, Jakarta.

Piron. (2005). *"The Right to Development"*. OECD
<https://www.oecd.org/?dataoecd/23/35/2508761.pdf>.

Techonology Mining. (2022). *"Glencore to pay up to \$1.5bn to settle corruption allegations"*. Mining Techonology. <https://www.mining-technology.com/news/glencore-corruption-allegations/>.

"The Dark Side of Congo's Cobalt Rush | The New Yorker." 24 May. 2021,
<https://www.newyorker.com/magazine/2021/05/31/the-dark-side-of-congos-cobalt-rush>.

The New York Times. (2019). *"This Is Our Land"*.
<https://www.nytimes.com/2019/01/26/opinion/sunday/congo-mining-election-fraud.html>